



## **Sistem Keamanan Bakamla dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Zona Maritim Barat**

**Febri Alfayed<sup>1</sup>, Gilang Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang  
190565201113@student.umrah.ac.id, 190565201114@student.umrah.ac.id

### **Kata kunci:**

Keamanan; Pengawasan; system.

### **Abstrak**

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga non struktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla) Badan Keamanan Laut. Tujuan peneliti adalah. untuk mengetahui bagaimana sistem keamanan bakamla dalam melakukan pengawasan di kawasan zona maritim barat. Dan mengetahui lebih dalam bagaimana perlengkapan kapal, senjata untuk keberlangsungan keamanan dan pengawasan. Serta permasalahan dari peristiwa yang ada di sekitar laut Indonesia terkhusus bagian zona maritim barat. Metode yang peneliti gunakan merupakan hasil dari observasi wawancara dan deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem keamanan BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di kawasan zona maritim barat. Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian adalah data kejadian dari bulan Januari sampai April tahun 2022.

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut<sup>1</sup>. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategik. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula. Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan

keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Bakamla.

Negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Terentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Namun secara umum, negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijuluki dengan negara maritim. Karna Indonesia sendiri memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Dan Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Dan juga berbatasan dengan dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla) Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional

Dasar hukum dari Bakamla adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. Bakamla hadir menggantikan Bakorkamla yang memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatakan secara jelas mengenai Bakorkamla. Penggantian tersebut dilakukan karena Bakorkamla dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan sesuai dengan berjalannya waktu. Bakamla merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama Indonesia Coast Guard (ICG).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem keamanan bakamla dalam melakukan pengawasan di kawasan zona maritim barat. Dan mengetahui lebih dalam bagaimana perlengkapan kapal, senjata untuk keberlangsungan keamanan dan pengawasan. Serta permasalahan dari peristiwa yang ada disekitar laut Indonesia terkhusus bagian zona maritim barat.

### **Metode**

Tulisan ini merupakan hasil dari observasi wawancara dan deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana system keamanan BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di kawasan zona maritime barat. Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian adalah data kejadian dari bulan januari sampai april tahun 2022. Data dan informasi yang didapat diolah menggunakan analisis data model spradley(1980). Semua data lapangan dibuat sebagaimana dianjurkan oleh spradley(1980:65-68), yaitu: Prinsip identifikasi bahasa, yaitu mengidentifikasi bentuk bahasa yang digunakan. Prinsip verbatim, yaitu mencatat ucapan atau perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh pelakunya. Prinsip konkrit, yaitu menggunakan bahasa yang kongkrit, yaitu bukan hanya memberikan nama pada suatu tindakan.

Hasil temuan penelitian selama dilakukan observasi dan wawancara di lapangan ditulis dalam bentuk tulisan etnografis dan dilakukan secara bertahap.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini merupakan hasil yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian. Hasil ini merupakan bagian yang paling orisinil dalam suatu penelitian. Negara Indonesia terdiri kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Bakamla dalam menghadapi ancaman kejahatan di perairan wilayah Indonesia sangatlah susah. Dengan didirikannya instansi bakamla hadir dan siap menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia meskipun itu sangatlah susah dikarenakan banyaknya ancaman dan masalah di perairan di wilayah Indonesiani yang selalu dan siap untuk datang.

Seperti yang kita ketahui kejahatan, ancaman yang selalu terjadi dan menyulitkan bakamla di perairan wilayah Indonesia adalah Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/ Penyelundupan manusia, terorisme dan bajak laut. Melalui Bakamla RI hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia aman dan selamat dari kejahatan dan ancaman di perairan wilayah Indonesia ini merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industry perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

BAKAMLA memiliki system pemantau guna menyelidiki keamanan dan keselamatan diperairan seperti: vessel scrutiny (pemantauan dan tracking kapal berdasarkan data AIS), vessel vinder ( pemantauan kapal berdasarkan data Automatic Identification System (AIS), fleetmoon ( pemantauan kapal berdasarkan data AIS), vessellink ( pemantauan kapal berdasarkan data AIS),marine traffic ( pemantauan kapal berdasarkan data Automatic Identification System (AIS)

Menurut UU NO 32 TAHUN 2014 tentang kelautan, pada pasal 61-63 BAKAMLA memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan. BAKAMLA dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam permasalahan diperairan Indonesia. BAKAMLA menjalankan tugas dan fungsinya dengan beberapa sistem keamanan yang dimiliki oleh BAKAMLA. Pada bidang operasi BAKAMLA sendiri memiliki mekanisme kerja. Seperti collecting, displaying, corellating, analyzing dan disseminating. BAKAMLA bekerjasama dengan stakeholder Maritim lainnya untuk memantau situasi maritim dan melaksanakan analisa dalam rangka membangun maritime picture sehingga terciptanya maritime awarenes yang dapat menghasilkan deteksi dini yang selanjutnya Dan dalam melancarkan tugas dari Badan keamanan laut , BAKAMLA sendiri melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya terutama instansi maritim. Seperti TNI-AL, BNN, BEA CUKAI, BSSN, SAR dan instansi lainnya yang berhubungan dengan maritim. Dan dalam melakukan kerjanya, BAKAMLA memiliki siklus operasi. Yaitu dimulai dari target, deteksi, monitor, periksa, tangkap, penyidikan dan pengadilan. Dan dalam melakukan pengawasan dan keamanan,BAKAMLA memiliki alat bantu sepertinya sensor sistem seperti satelit, LRC, radar dan drone, platform sistem. BAKAMLA Memiliki beberapa kapal yaitu; kapal 1 KN TANJUNG DATU 301 (110 M), 1 KN PULAU NIPAH 321 (80 M), 2 KN BINTANG LAUT & KN BELUT (48 M), 2 HSC,5 CATAMARAN (12 M), 5 RHIB (12 M & 8 M).

Dengan perlengkapan dan peralatan dari BAKAMLA mungkin sudah memadai. Tetapi untuk luas perairan Indonesia masih dibutuhkan banyak kapal untuk memudahkan dan meringankan BAKAMLA untuk berpatroli di perairan Indonesia. Tidak hanya itu, BAKAMLA sendiri pada tahun sebelumnya pada tahun 2021 melakukan patroli sebanyak 120 hari, dibandingkan dengan tahun 2022 sekarang hanya melakukan patroli 24 hari. Hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan untuk BAKAMLA dipotong untuk kebutuhan penanganan covid -19. Didalam rancangan UU, BAKAMLA sendiri segera dijadikan oleh Presiden RI garda terdepan dalam urusan perairan, sehingga dalam melakukan kegiatannya tidak tumpangtindih dengan instansi maritim lainnya.

Walaupun Indonesia memiliki instansi keamanan laut tetapi masih banyak terjadinya kasus kejahatan yang berada di perairan Indonesia. Hal itu terjadi dikarenakan perairan Indonesia yang terlalu luas sehingga masih memiliki banyak celah untuk oknum-oknum melakukan tindak kejahatan. Dan juga hal ini dapat dilakukan kajian yang cukup dalam untuk meminimalisirkan tindak kejahatan tersebut. Hal juga yang harus dilakukan ialah dengan membangun banyak armada dan pangkalan di wilayah Indonesia, terutama wilayah yang berdekatan atau berbatasan dengan perairan Indonesia.Indonesia merupakan negara maritim, maka negara Indonesia rentan dan mudah terjadinya kejahatan, kecelakaan laut dan lainnya. Menurut rekap data yang kami dapatkan, pada bulan Januari sampai April 2022 terjadi kecelakaan laut sekitar 192 kasus dan kejadian diperairan laut Indonesia pada bulan januari sampai april tahun 2022 50 kasus kejadian. Terdapat 97 korban tewas, 95 korban jiwa dan 27 korban hilang. Sementara itu pada kasus kejadian dilaut terdapat 50

kasus. Dan didalam kasus kejadian BAKAMLA bekerjasama dengan instansi maritim lainnya. Seperti TNI-AL, KKP, Bea Cukai, BNN, POLAIR sampai dengan PMI. Didalam data diterangkan bahwa banyak upaya BAKAMLA dalam menjaga daerah perairan Indonesia seperti menggagalkan penyelundupan, menggalang penyeludupan narkoba, mengamankan TKI/TKW ilegal dan membantu PMI dalam mempercepat penanganan keselamatan.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan adalah .Bakamla RI hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas dan fungsi bakamla juga dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia juga membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Manfaat dari pembentukan Bakamla yang dapat dirasakan oleh Negara Indonesia adalah dalam ketentuan Bakamla telah mengatur mengenai sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (Early Warning System) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geologis dan Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Untuk mengetahui atau medeteksi setiap anomaly atau permasalahan yang terjadi di perairan laut Indonesia Dalam hal Pengamanan Dan Keselamatan.

### **Daftar Pustaka**

- Leo Rasiddin, Rudi Sutanto,(2021). STRATEGI BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENGAMANAN DAN KESELAMATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA , Vol 7, No 3, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/861>
- Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, (2022) , KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA, <HTTPS://LONSUIT.UNISMUHLUWUK.AC.ID/INDEX.PHP/YUSTISIABEL/ARTICLE/VIEW/1591>
- I Kadek Deny Sucrisma Adipta,(2020). SISTEM INFORMASI PENDATAAN KAPAL PADA BAKAMLA MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL, <http://library.stikom-bali.ac.id/7768/sistem-informasi-pendataan-kapal-pada-bakamla-menggunakan-framework-laravel>
- N. A. A. L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto,(2017) KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, pp. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15743>